

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara memiliki operasional pengeluaran dalam membiayai kebutuhan internalnya dalam rangka mewujudkan kemakmuran bagi rakyatnya. Pembiayaan pemerintah dapat diklasifikasikan kedalam Pembiayaan rutin dan pembiayaan pembangunan. Dua-duanya dibiayai oleh pendapatan dari negara. Pembiayaan rutin merupakan pengeluaran yang pasti ada kemudian sudah ada rencana sebelumnya diawal. Pembiayaan rutin berupa pembiayaan rutin belanja pegawai, pembiayaan beban barang, pembiayaan pengurangan harga atau bisa disebut pemberian subsidi kepada daerah otonomi di ke setiap masing-masing daerah, pembiayaan angsuran cicilan utang negara. Kemudian pembiayaan pembangunan bisa disebut pembiayaan yang diperuntukan untuk memberikan pinjaman untuk proyek pembangunan negara dalam mensukseskan kesejahteraan bagi rakyatnya.

Pada masa sekarang ada 100 BUMN di Indonesia, namun mayoritas seluruh BUMN ini tidak terlalu produktif dan berpengaruh dalam menyumbang devisa bagi negara. Supaya BUMN dapat menjadi signifikan dalam memberikan devisa bagi negara perlu adanya perbaikan dari sisi luar dan dalam. Dalam membeikan pembiayaan rutin negara yang sangat besar yang demikian tersebut, sebaiknya diperlukan pemasukan devisa yang besar juga. Salah satu sumber devisa negara yang tidak kalah penting dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Di Indonesia pada saat ini sudah memiliki 144 perusahaan plat merah yang biasa disebut dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) kemudian menyambung ke Undang-Undang No 19 Tahun 2013 berkenaan dengan BUMN, bahwa “BUMN adalah badan usaha yang seluruh maupun sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan”.

Dasar hukum BUMN berupa Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 kemudian melalui Undang-Undang No. 19 tahun 2003 menyebutkan dan mendefinisikan bahwa BUMN mempunyai dua bentuk, yaitu Persero dan Perusahaan Umum (Perum). Dengan hal ini, BUMN adalah amanat dari Undang-Undang yang mempunyai visi yaitu mensejahterakan Rakyat Indonesia secara keseluruhan.

Adanya BUMN ini selain visinya mensejahterakan rakyat kemudian berkontribusi memberikan devisa yang selanjutnya diperuntukan untuk pembangunan sektor ekonomi negara ke APBN yang disebut “Bagian laba BUMN”, sektor pajak dan hibah. Hal yang demikian sudah diutarakan pada Undang-Undang No 17 tahun 2013 berkenaan dengan keuangan negara bahwa pendapatan negara meliputi beberapa sektor, berupa pajak, penerimaan hibah dari dalam dan luar negeri dan penerimaan negara bukan pajak.

Dari tahun ke tahun, pada bagian sisi laba BUMN tidak terlalu berpengaruh terhadap pendapatan ke negara ke dalam APBN, jika dipresentasikan sektor laba BUMN pada pendapatan negara hanya menyumbang 3% dari keseluruhan pendapatan. Fakta ini tentu memberikan potensi yang kurang baik terhadap kinerja BUMN. Secara sederhana jika dibandingkan dengan sektor cukai misalnya dalam memberikan devisa ke negara. Dari sisi cukai tembakau ia menyumbang setiap tahunnya rata-rata 6,35% terhadap keseluruhan pendapatan negara. Ini berarti dua kali lebih besar persentasenya ketimbang laba dari BUMN.

Contoh terbaru adalah kinerja BUMN yang diukur dari laba bersih. Kontribusi total laba bersih BUMN lebih dari separuhnya disumbangkan oleh BUMN yang sudah “Go Public” maupun sudah terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Padahal jumlahnya hanya sekitar 20 perusahaan. Meskipun jika ditambah dua perusahaan yakni Pertamina dan PLN, kontribusi laba bersih mencapai 81% lebih. Sisa sekitar 19% kontribusi laba bersih BUMN lainnya. Nilai ini menunjukkan masih banyak BUMN yang tingkat pendapatan dan profitnya masih rendah, meskipun tercatat merugi. Kemudian dari sisi eksternal intervensi politik sering kali membuat kinerja BUMN terombang-ambing.

Tidak terlalu bersinarnya BUMN memberikan trek recordnya di dalam negeri sendiri karna ada pengaruh internal dan eksternal. Dari sektor internal : manajemen pengelolaan BUMN ditangani secara kurang profesional dan kurangnya modal dalam melakukan operasional sehari-hari dan promosi. Kinerja BUMN yang baik biasanya pada BUMN yang sudah “Go Public”

Berkaca dengan pernyataan diatas peneliti tertarik untuk meneliti salah satu perusahaan yang terdaftar di Bursa efek Indonesia dalam bidang konstruksi yaitu PT. Wijaya Karya (Persero) Tbk. Kenapa, pada tahun 2015 pemerintah menggelontorkan atau memberikan modal tambahan pada perusahaan tersebut sekitar 5,8 triliun Rupiah atau setara kepemilikan saham 65,05% di PT. Wijaya Karya (Persero) Tbk sehingga BUMN ini memiliki dana yang cukup untuk mengoprasionalkan dan memproduksi barang dan jasa sehingga nantinya berdampak pada pendapatan perusahaan hasil akhirnya negara diuntungkan.

Dana yang cukup bertujuan agar kegiatan operasional perusahaan dapat berjalan sesuai rencana. Pendanaan perusahaan dapat berasal dari internal atau eksternal perusahaan. Sumber dana internal terdiri dari penyusutan, kewajiban yang belum jatuh tempo, dan laba ditahan (*retained earning*). Dana eksternal biasanya berasal dari kredit perdagangan dan pinjaman. Perusahaan bisa memperoleh pendanaan dari luar ketika dana keuangan perusahaan tidak cukup untuk operasional perusahaan, atau ketika pendanaan dari luar dianggap lebih menguntungkan. Pendanaan dari luar dapat berupa pinjaman dari kreditor. Dikutip dari Ritonga et al (2004 dalam buku *Kebijakan Fiskal : Pemikiran, Konsep, Dan Implementasi*) bahwa “para pemegang saham dan kreditor seringkali tertarik melihat besarnya *Profit* suatu perusahaan dalam tujuannya untuk mengetahui kemampuan perusahaan mengembalikan modal sekaligus keuntungan dari kepemilikan saham tersebut yang telah ditanamkan dalam perusahaan”. Penggunaan modal oleh perusahaan dapat dilihat dari penggunaan utang perusahaan baik melalui kredit perbankan, pinjamana pemerintah ataupun pinjaman dari pihak lain. Penggunaan modal dalam perusahaan akan berdampak pada profitabilitas yang akan diterima oleh perusahaan melalui

besarnya *return on equity* (ROE) atau *return on asset* (ROA) yang kemudian dapat meningkatkan nilai perusahaan.

Pertumbuhan populasi dan pesatnya urbanisasi menjadi dua faktor yang mendorong kenaikan nilai pasar konstruksi Indonesia menjadi Rp 1 436,9 triliun di tahun 2017 (industri.bisnis.com 2017). Hal itu akan terus meningkat dan merupakan peluang bisnis untuk sektor konstruksi. Namun dibalik itu kekurangan modal adalah hal yang menjadi salah satu kendala utama para pelaku bisnis di bidang konstruksi. Maraknya pembangunan infrastruktur membuat kredit perbankan untuk sektor konstruksi tumbuh 21 persen menjadi Rp 248,1 triliun pada September 2017 dibandingkan dengan September 2016 (OJK 2017). Pertumbuhan tingkat kredit perbankan perusahaan konstruksi pada September 2017. Tingginya kredit perbankan perusahaan konstruksi merupakan konsekuensi dari operasional dalam membangun infrastruktur, hal ini tampak bahwa anggaran yang digelontorkan tidak sedikit, yaitu Rp 378 Triliun Rupiah (OJK 2017).

Tabel 1.1

Perkembangan *Profitability Rasio*

PT. Wijaya Karya (Persero) Tbk. Periode Tahun 2015-2018

Information	Tahun			
	2015	2016	2017	2018
Pretax Margin (%)	8.062	7.853	5.587	6.784
Net Profit (earning Margin) (%)	4.589	6.444	4.592	5.364
Dividen Payaout Ratio	0.2	0.297	0.2	0.27
Dividen payout Ratioincl Special Dividend	0.2	0.297	0.2	2.06

Tabel 1.2
Perkembangan Asset Utilitization Ratio
PT. Wijaya Karya (Persero) Tbk. Periode Tahun 2015-2018

Information	Tahun			
	2015	2016	2017	2018
Total Asset Turnover	0.695	0.504	0.573	0.580

Tabel 1.3
Perkembangan Growth Ratios
PT. Wijaya Karya (Persero) Tbk. Periode Tahun 2015-2018

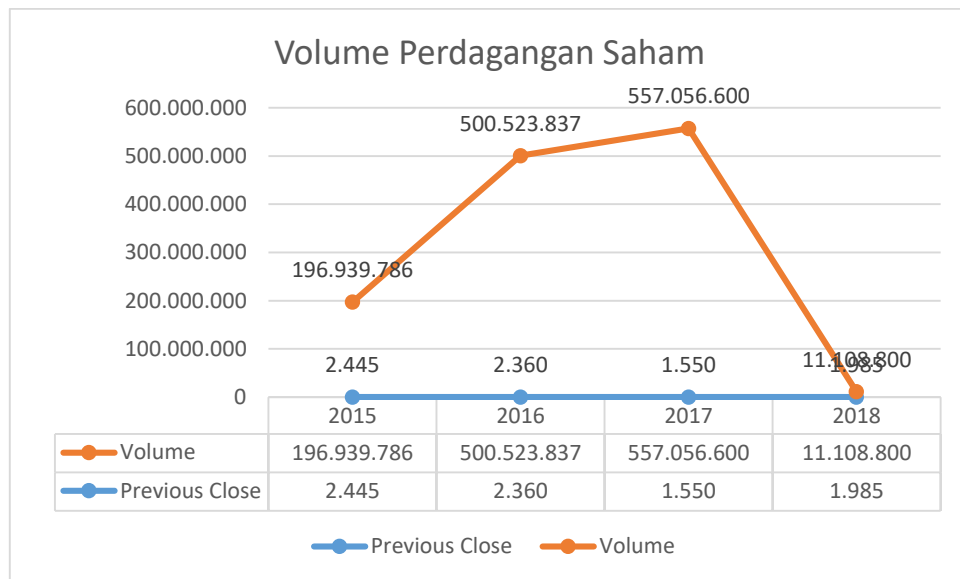
Information	Tahun			
	2015	2016	2017	2018
Revenue Growth (%)	9.282	15.042	67.06	17.66
Net Earning Growth (%)	1.603	61.545	19.049	52.89

Sumber : Rasio Modal, Pertumbuhan dan Profit PT. Wija Karya (Persero) Sepanjang tahun 2015-2018. Bareksa.com (data diolah)

Investor yang akan menanamkan modalnya dalam sebuah perusahaan membutuhkan informasi mengenai perusahaan tersebut. Informasi yang diperoleh bisa berupa laporan keuangan perusahaan dan aktivitas perdagangan saham untuk mengetahui kinerja perusahaan. Jumlah perdagangan saham yang meningkat setiap harinya menunjukkan banyaknya peminat saham tersebut, terutama investor individual. PT. Wijaya Karya (Persero) Tbk menunjukkan angka penjualan saham yang fluktuatif sepanjang periode 2008-2017. PT. Wijaya Karya (Persero) Tbk pernah mengalami penurunan volume perdagangan saham yang sangat signifikan tahun 2015 dan 2018.

Volume Perdagangan saham PT. Wijaya Karya (Persero) Tbk tersebut dapat terlihat pada garfik dibawah ini.

Gambar 1.1
Volume Perdagangan Saham
PT. Wijaya Karya (Persero) Tbk 2015-2018



(Sumber: *finance.yahoo.com*) data diolah

Penurunan volume perdagangan saham dapat menyebabkan perusahaan kekurangan modal dari internal sehingga harus menggunakan dana eksternal berupa pinjaman. PT. Wijaya Karya (Persero) Tbk memiliki utang akan terus meningkat selama periode 2015-2017 namun pada tahun 2018 utang tersebut mulai stabil. Pada tahun 2017 PT. Wijaya Karya (Persero) Tbk memiliki total utang hingga 26,8 triliun rupiah. Peningkatan utang PT. Wijaya Karya (Persero) Tbk juga belum mampu menyaingi pendapatan 4 BUMN konstruksi terbesar lainnya di bursa saham. Tingginya total utang perusahaan akan mempengaruhi rasio *leverage* dalam hal ini

Debt to equity ratio (DER) dan Debt to asset ratio (DAR). Semakin tinggi kenaikan level DER dan juga DAR maka perusahaan menanggung beban terhadap pihak luar akan semakin besar pula, kemudian ada potensi untuk kinerja perusahaan menurun karna terlalu bergantung ke pihak luar yang sangat tinggi.

PT. Wijaya Karya (Persero) Tbk sebagai satu diantara beberapa BUMN sektor konstruksi terbesar di Indonesia menunjukkan tingkat pertumbuhan laba sebesar 345% pada semester 1 tahun 2017. Pertumbuhan laba PT. Wijaya Karya (Persero) Tbk adalah tertinggi di antara BUMN konstruksi lainnya, yaitu PT. Adhi Karya (Persero) Tbk sebesar 236%, PT. Waskita Karya (Persero) Tbk sebesar 219%, dan PT. Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk sebesar 161%. Namun demikian, pendapatan PT. Wijaya Karya (Persero) Tbk pada semester 1 tahun 2017 menjadi yang terendah di antara BUMN konstruksi lainnya. PT. Wijaya Karya (Persero) Tbk hanya mampu memperoleh pendapatan sebesar 3,9 triliun rupiah pada semester 1 tahun 2017. Pendapatan paling tinggi diperoleh oleh PT. Waskita Karya (Persero) Tbk yang mendapatkan laba kotor mencapai 15,5 triliun rupiah pada semester 1 tahun 2017.

Tingginya tingkat modal yang diperoleh dapat mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan. Rasio modal PT. Wijaya Karya (Persero) Tbk terbilang cukup tinggi. Nilai DER yang selalu di atas 1 berarti bahwa biaya operasional perusahaan cenderung dibiayai oleh pemerintah karna pada tahun 2015 PT. Wijaya Karya (Persero) menerima suntikan dana sebesar 5,8 Triliun atau 65,05% kepemilikan saham didalamnya. PT. Wijaya Karya (Persero) Tbk tahun 2015-2017 menunjukkan tingkat *moving average profit* yang paling rendah. DER PT. Wijaya Karya (Persero) Tbk tahun 2017 kembali meningkat menjadi 2,04. Nilai tersebut berbanding terbalik dengan dengan rasio profitabilitas yang dihasilkan *Return on Equity Ratio (ROE)* PT. Wijaya Karya (Persero) Tbk tahun 2016 mengalami penurunan dari

0,13 pada tahun 2015 menjadi 0,09 pada tahun 2016 dan masih tidak berubah hingga tahun 2017. *Return on Asset Ratio* (ROA) menunjukkan hal yang sama, terjadi penurunan nilai ROA tahun 2017 terhadap tahun 2016 dari 0,04 menjadi 0,03. Penurunan nilai ROE sudah terjadi dari tahun 2013 hingga 2016 dan tetap samahingga 2017 yang diiringi oleh fluktuasi DER yang turun naik hingga tahun 2017. Penurunan nilai ROA tidak lebih besar dari ROE karena nilai ROA PT. Wijaya Karya (Persero) Tbk dari tahun 2008 lebih stabil jika dibandingkan nilai ROE.

Data yang demikian menunjukkan bahwa tingginya modal tidak dibarengi dengan meningkatnya pendapatan. Pendapat ini berkebalikan dengan teori yang menyebutkan bawa ketika modal mengalami peningkatan maka pendapatan ikut meningkat pula. kemudian hal ini berpengaruh juga terhadap dividen yang dibagikan pada tiap lembar saham yang dimiliki oleh PT. Wijaya Karya (persero) Tbk kepada para pemilik modal dalamnya. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul **“Pengaruh Modal Terhadap Pendapatan Pada PT. Wijaya Karya (Persero) Tbk tahun 2015-2018”** dengan “modal” yang dimaksud disini adalah berupa dana yang dikeluarkan oleh pemerintah uang yang senilai 5,8 triliun rupiah.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka peneliti dapat merumuskan masalah penelitian ini kedalam beberapa point, yaitu :

- a. Apakah modal berpengaruh terhadap pendapatan pada PT. Wijaya Karya (Persero) Tbk Priode 2015-2018 ?
- b. Seberapa besar pengaruh modal terhadap pendapatan pada PT. Wijaya Karya (Persero) Tbk tahun 2015-2018 ?

- c. Seberapa besar dalam angka pendapatan negara dari BUMN PT. Wijaya Karya (Persero) Tbk menurut Undang-Undang No 17 tahun 2003 berupa Pajak, pendapatan bukan pajak (deviden) dan hibah ?

1.3 Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah diuraikan diatas, maka tujuan penelitina ada dua. Hal itu diantaranya :

- a. Untuk mengetahui Apakah Modal Bepengaruh Terhadap Pendapatan Pada PT. Wijaya Karya (Persero) Tbk Priode 2015-2018 !
- b. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh modal terhadap pendapatan pada PT. Wijaya Karya (Persero) Tbk tahun 2015-2018 !
- c. Untuk Mengetahui Seberapa besar dalam angka pendapatan negara dari BUMN PT. Wijaya Karya (Persero) Tbk menurut Undang-Undang No 17 tahun 2003 berupa Pajak, pendapatan bukan pajak (devidend) dan hibah !

1.4 Kegunaan Penelitian

Melalui penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan informasi yang akurat, dan dapat memberikan manfaat oleh berbagai pihak sebagai berikut :

1. Bagi peneliti

Hasil dari penelitian ini berguna menambah khasanah ilmu pengetahuan, dan menambah wawasan akademik dari bidang bagaimana pengaruh Modal terhadap pendapatan pada PT. Wijaya Karya (Persero) Tbk Priode 2015-2018 dan Seberapa besar dalam angka pendapatan negara dari BUMN PT. Wijaya Karya (Persero) Tbk menurut UU No 17 tahun 2003

2. Bagi emiten

Dari hasil penelitian ini dapat menjadi pertimbangan dalam membuat keputusan sehingga nantinya bisa mengeluarkan kebijakan yang maksimal terhadap kinerja keunagn perusahaan. Terutama dalam pengelolaan modal sehingga bisa diambil langkah-langkah dalam penyusunan laporan keuangan

3. Bagi investor

Pengantisipasi informasi akrual yang ada dalam laporan keuangan emiten kemudian investor bisa mendeteksi adanya praktik manajemen laba sehingga hal ini bisa menjadi pertimbangan bagi investor. Hal yang demikian adalah manfaat dari penelitian ini bagi investor.

4. Bagi akademisi

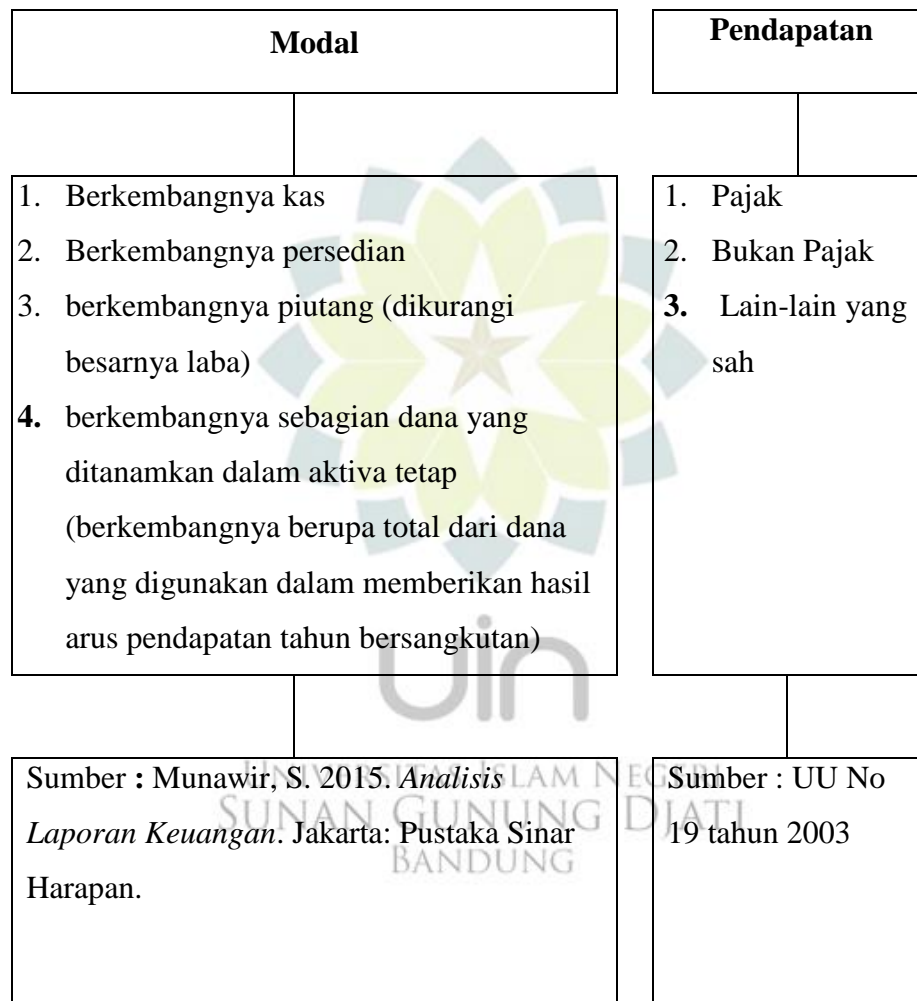
Dari hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan masukan berupa bahan bagi penelitian lebih lanjut selain daripada itu sumbangan bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang administrasi keuangan, khususnya tentang manajemen modal, dan pendapatan.

1.5 Kerangka Pemikiran

Setiap BUMN memiliki visi jangka panjang berupa semaksimal mungkin mememanajemenkan kekayaan pemegang saham atau modal sehingga bisa memiliki *gros revenue* yang cenderung meningkat. Hal tersebut berarti pihak manajemen memiliki kewajiban untuk mengelola saham yang telah ditanam pada perusahaan dengan sebaik mungkin. Manajemen dituntut untuk memaksimalkan kekayaan pemegang saham agar mencapai pendapatan yang dihapkan. Mengimplementasikan manajemen Modal dengan baik yaitu mengelola perputaran Modal. Apabila manajemen dapat mengelola semua itu maka hasilnya adalah peningkatan pendapatan atau profit.

Salah satu faktor yang tidak bisa dihindari dalam perusahaan adalah Modal. Modal atau usaha yang relatif besar akan memungkinkan perusahaan memiliki jumlah barang dalam skala yang besar, dengan cara tersebut akan sangat memungkinkan pendapatan atau laba dari hasil penjualan barang perusahaan akan semakin besar pula.

Gambar 1.4
Tabel Indikator Modal dan Pendapatan



Penelitian ini dilakukan pada tahun 2018



uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG